

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektor primer, skunder dan tersier.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki struktur ekonomi yang cukup baik. Prestasi ekonomi Indonesia dapat dinilai dengan berbagai ukuran, salah satunya diukur melalui struktur ekonominya. Struktur ekonomi bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu, namun juga untuk membandingkan dengan negara lainnya.

Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang secara radikal. Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, dan produktivitas buruh, stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Perekonomian negara terbelakang seperti biasanya ditandai oleh luasnya sektor primer, dan sempitnya sektor sekunder serta tersier. India misalnya, sektor primer, angka 49,4 persen dari output nasional netto di tahun 1949-1950, sektor sekunder 16,6 persen dan sektor tersier 18,6 persen. Perubahan struktural dapat bermula dengan peralihan penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier (Jhingan, 2002: 43).

Struktur perekonomian Indonesia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengah dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat sebetulnya merupakan hasil dari keberhasilan pembangunan di daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka pemerintah daerah mendapat peran yang sangat besar dalam melakukan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu mendorong pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut di akibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan aktivias manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ini hanya terkonsentrasi di daerah pusat saja dan kurang memperhatikan daerah pendukung. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah. (Putra Fajar Utama, 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2001), Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kapasitas dalam jangka panjang suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian suatu daerah. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Struktur ekonomi ekonomi suatu daerah terdiri dari nilai tambah bruto yang diciptakan tiap kategori lapangan usaha. Struktur ekonomi juga dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing lapangan usaha.

Pembangunan ekonomi dalam konteks regional, pada dasarnya sama dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, oleh karena yang menjadi

pokok permasalahan sama yaitu mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan berbagai masalah lainnya.

Tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup “pergeseran” yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke jasa. Dampak pembangunan suatu daerah, seperti mengenai perubahan sektor-sektor apa yang meningkat atau menurun, merupakan pengetahuan yang penting dalam pembangunan suatu daerah Todaro (2008: 68).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang berkembang di Indonesia yang mempunyai potensi wilayah, kondisi geografis maupun potensi khas lain yang berbeda dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu penyusunan kebijakan pembangunan daerah tidak dapat serta merta mengadopsi kebijakan nasional, provinsi maupun daerah lain yang maju. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi daerah. Agar dapat memetakan keadaan perekonomian provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keberhasilan suatu pembangunan di daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama dapat dilihat dari pertumbuhan dan struktur perekonomian pada daerah tersebut, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik primer maupun sekunder. Perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi yang dimiliki serta sumber daya yang diperlukan dalam melakukan pembangunan.

Proses pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer menuju sektor sekunder. Pergeseran pertumbuhan sektor produksi ini secara langsung juga akan berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja dari yang semula bermata pencaharian utama pada sektor pertanian, bergeser ke sektor industri, perdagangan dan jasa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama
Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1291191	61.61	1284591	61.04	1321274	60.77	1368296	61.65	1214060	53.32
2	Pertambangan dan Penggalian	29537	1.41	23052	1.10	19050	0.88	18435	0.83	29251	1.28
3	Industri Pengolahan	158501	7.56	150998	7.56	166194	7.64	136766	6.16	167476	7.35
4	Listrik, Gas dan Air	2176	0.10	3734	0.18	5038	0.23	3537	0.16	9354	0.41
5	Bangunan	81634	3.90	76341	3.63	79317	3.65	74754	3.37	103451	4.54
6	Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Makan	154124	7.35	165532	7.87	177571	8.17	189109	8.52	231989	10.19
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	95738	4.57	104267	4.95	90815	4.18	105091	4.74	126833	5.57
8	Kuangan, Asuransi, Usaha Persewaan dan Bangunan	18434	0.88	22371	1.06	23528	1.08	29180	1.31	20806	0.91
9	Jasa -Jasa	264298	12.61	273621	13.00	291441	13.40	294123	13.25	373848	16.42
	Total	2095633	100	2104507	100	2174228	100	2219291	100	2277068	100

Sumber: Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2012-2016

Tabel 1.1 dapat memberi gambaran mengenai ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah tenaga kerja per sektor di provinsi NTT mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah tersebut. Sektor-sektor tersebut masing-masing memberikan kontribusi dengan proporsi berbeda terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja di provinsi NTT. Pada tahun 2016, bila dilihat menurut sektor, empat sektor menempati posisi teratas yaitu pertanian, jasa, perdagangan dan industri. Tenaga kerja mayoritas terserap di pertanian 1,21 juta orang atau 53,32 persen, diikuti sektor jasa 0,37 juta orang

atau 16,42 persen, perdagangan sebesar 0,23 juta orang atau 10,19 persen, dan industri 0,17 juta orang atau 7,35 persen. Sektor lainnya seperti transportasi, konstruksi, pertambangan dan lembaga keuangan dibawah 5 persen dan sektor yang menyerap tenaga kerja terendah adalah sektor listrik, gas dan air minum sebesar 0,41 persen.

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan peternakan mampu menyerap tenaga kerja yang terbanyak pada tahun 2012 sebesar 61,61 persen jiwa menjadi sebesar 53,32 persen jiwa pada tahun 2016 menunjukkan tiap tahunnya sektor pertanian ini mengalami penurunan yang paling banyak ketimbang sektor industri, perdagangan dan jasa. Untuk itu perlu kita ketahui sektor-sektor perekonomian yang menunjukkan prestasi positif sesuai dengan sektor-sektor yang sama di tingkat nasional, dan mengintrospeksi kembali perencanaan dan strategi pembangunan yang utamanya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja setiap sektor perekonomian.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur (juta rupiah),
Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
	-1	-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16,528,722.4	18,272,822.4	20,456,313.6	22,765,546.2	24,315,926.5
B	Pertambangan dan Penggalian	767,939.8	894,151.9	986,038.1	1,073,475.1	1,166,764.1
C	Industri Pengolahan	685,717.8	758,818.3	843,707.7	940,861.5	1,034,288.8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,701.6	23,569.5	33,612.2	43,569.1	59,408.5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37,866.8	41,817.7	45,529.0	47,150.4	48,990.4
F	Konstruksi	5,715,885.6	6,344,807.9	7,095,979.0	7,908,227.1	9,095,348.6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	5,934,067.8	6,569,891.7	7,296,703.0	8,272,330.6	9,321,848.1
H	Transportasi dan Pergudangan	2,766,577.6	3,195,324.8	3,566,949.6	3,986,583.3	4,528,290.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	316,289.7	367,820.1	422,442.8	487,091.2	586,078.9
J	Informasi dan Komunikasi	4,427,236.5	4,660,243.4	5,134,426.1	5,477,448.6	5,878,512.6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,011,444.5	2,389,329.0	2,698,906.3	2,995,474.7	3,362,944.2
L	Real Estate	1,487,242.7	1,705,495.2	1,860,877.7	2,054,341.0	2,209,475.8
M,N	Jasa Perusahaan	166,499.2	188,486.7	210,878.8	235,528.0	257,185.0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,738,860.5	7,592,137.3	8,392,731.6	9,374,990.7	10,664,988.8
P	Jasa Pendidikan	4,904,495.7	5,679,554.1	6,543,780.8	7,303,246.2	8,103,265.0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,165,779.3	1,279,704.3	1,414,584.0	1,585,475.4	1,767,997.1
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,214,817.9	1,361,280.9	1,496,973.5	1,639,515.4	1,771,424.8
	Produk Domestik Regional Bruto	54,893,145.4	61,325,255.2	68,500,433.8	76,190,854.5	84,172,737.2

Sumber: PDRB NTT menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2012-2016

Dalam tabel 1.2 dapat di lihat bahwa Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB NTT. Pada tahun 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur ekonomi NTT (28,89 persen), kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (12,67 persen); lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (11,07 persen); lapangan usaha konstruksi (10,81 persen); lapangan usaha jasa pendidikan (9,63 persen); lapangan usaha informasi dan komunikasi (6,98 persen); dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan (5,38 persen). Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 5 persen. Maka dari itu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang paling banyak memberikan kontribusinya untuk perekonomian di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan sektor lainnya.

Mengingat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Timur, tentunya dibutuhkan kondisi atau iklim usaha yang sehat dan kondusif, serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan industrialisasi yang berorientasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan terhadap tenaga kerja sektor pertanian, peternakan dan kehutanan yang

disebabkan oleh industrialisasi pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Transformasi masyarakat tradisional menuju ke ekonomi masyarakat maju dalam perkembangannya di tandai oleh semakin berkurangnya jumlah penduduk dan tingkat produktivitas pada sektor primer. Tingkat produktivitas di sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat produktivitas di sektor industri karena tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah di bidang pertanian berarti bisa dikatakan bahwa sebagian besar dari pendapatan digunakan untuk kebutuhan memenuhi pangan. Namun yang perlu diingat dari pembangunan ekonomi daerah adalah bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan kondisi perekonomian daerah lain yang juga merupakan bagian dari perekonomian nasional tersebut. Hal ini memberikan pemahaman bahwa analisis perekonomian daerah yang nantinya akan dipergunakan sebagai landasan pembangunan daerah, sebaiknya mengikutsertakan keadaan perekonomian di tingkat nasional dan keadaan perekonomian daerah lain sebagai pembanding.

Penentuan sektor unggulan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diketahui lebih awal dalam upaya memberikan informasi tentang sektor mana yang nantinya ditetapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan income base multiplier yang besar bagi sektor-sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan prioritas dengan memberikan analisa yang telah mempertimbangkan perkembangan atau trend indikator keunggulan pada sektor-sektor ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur,

sehingga penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan kebijakan pembangunan perekonomian kedepannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Analisis Struktur Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa sektor basis/unggulan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2012-2016?
2. Apa keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis sektor apa yang menjadi sektor unggulan/basis Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) perekonomian di provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2012-2016

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu (teori), khususnya dalam literatur ekonomi regional terkait dengan sektor unggulan dan keunggulan komparatif.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk menganalisis sektor unggulan/basis Kabupaten/Kota serta melihat struktur ekonomi dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2016.
2. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan (pemerintah) dalam melakukan implementasi guna mendorong pembentukan struktur perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.